

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja serta menjadi penopang saat terjadinya guncangan krisis ekonomi di Indonesia (Ningtiyas:2017). Akan tetapi seiring dengan pentingnya peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, ada saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan usahanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, serta kendala penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2012). Hal ini juga didukung oleh pendapat Zimmerer dan Scarborough dalam Maghfirah & BZ (2016) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, kurangnya pengalaman manajemen, dan kurang stabilnya keuangan akan mengakibatkan tingkat kematian bisnis mikro maupun kecil jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis yang sudah lebih besar.

UMKM sebagai salah satu jenis usaha di Indonesia juga memiliki persediaan yang harus dijual dan dikelola dengan baik agar mendatangkan keuntungan. Sehingga pengelolaan persediaan pada UMKM juga harus diperhatikan. Sharma (2010) mengatakan bahwa pengelolaan persediaan sangat penting dalam pengelolaan operasional. Namun yang menjadi permasalahan bagi para pelaku UMKM adalah kurangnya pengetahuan tentang *inventory management* atau pengelolaan persediaan yang baik. Standar mengenai persediaan

diatur dalam PSAK No 14 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, selain itu persediaan juga diatur dalam SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Bab 11 yang disahkan pada 19 Mei 2009. Setelah itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menyadari bahwa keberadaan entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah pondasi utama perekonomian, sehingga pengaturan dalam tatanan standar yang secara biaya tidak terlalu mahal dan secara manfaat tepat guna diperlukan untuk membantu entitas tersebut berkembang dimulai dengan kesadaran mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan, sehingga diterbitkanlah SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang disahkan per 24 Oktober 2016 dan mulai efektif pada 1 Januari 2018.

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional (Anggraeni, Hardjanto & Hayat, 2020). Perkembangan UMKM mengalami peningkatan yang sangat pesat sebelum adanya Covid 19.

Di Indonesia, Covid 19 memasuki babak baru sejak pertama kali menyebar pada kasus pertama yang diumumkan pada awal Maret 2020. Penyusutan Omzet

Pebisnis UMKM akibat covid 19 sangat signifikan sejak awal kemunculannya. Dampak pandemi covid 19 ini tentunya juga berimbas pada UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo, sebuah Provinsi di daratan Sulawesi Utara yang menjadi Provinsi terakhir dalam melaporkan kasus pertama infeksi covid 19 di tahun 2020. Jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo ini meningkat dari tahun ke tahun. Tentu krisis pandemi covid 19 ini juga memporakporandakan eksistensi UMKM di Provinsi Gorontalo (Ismail, 2021). UMKM melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Salah satu faktor keberhasilan dalam kelangsungan usaha adalah pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Sebaliknya jika entitas tidak melakukan pengelolaan persediaan dengan baik, maka entitas dapat memperoleh kerugian yang cukup signifikan (material). Pengambilan keputusan yang baik tentang persediaan akan mempertahankan kelangsungan usaha dan mendorong masyarakat sebagai pelanggan agar tidak meninggalkan produk yang dipasarkan (Wafi, 2019).

Persediaan harus dimiliki karena merupakan produk perusahaan yang harus dijual sebagai sumber pendapatan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena itu persediaan harus dikelola dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan sehingga tujuan perusahaan tercapai (Rudianto, 2012:222). Perusahaan memperoleh kas dari aktivitas penjualan persediaan, jika persediaan terjual dengan cepat maka perolehan kas juga akan semakin cepat dan

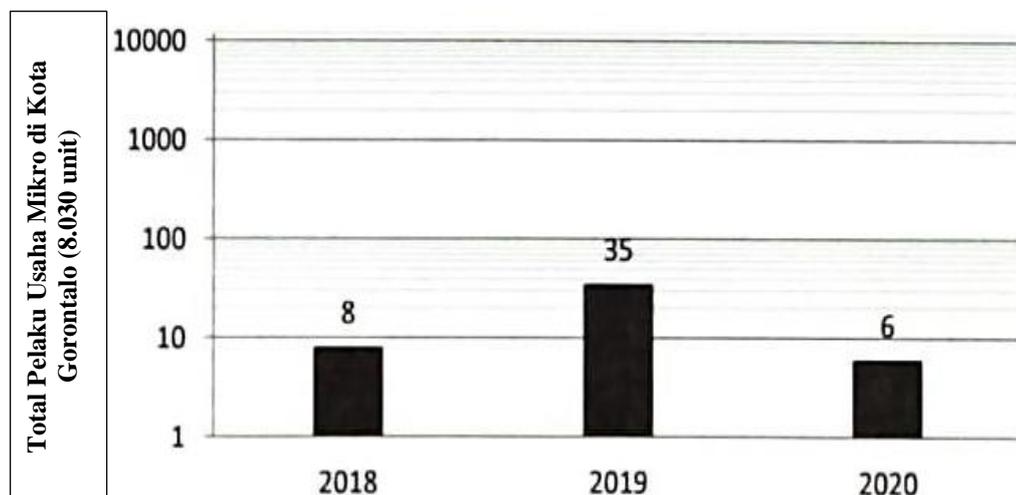
lancar. Barchelino (2016) menyatakan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan memprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan menjadi kas. Perusahaan yang dapat mengendalikan sistem persediaannya dengan tepat akan memudahkan perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan operasional dan menjaga kelancaran operasi perusahaan. Untuk itu persediaan barang menjadi hal yang penting, sebab sukses tidaknya perencanaan dan pengawasan persediaan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan, salah satunya pada penentuan keuntungan perusahaan. Perusahaan senantiasa memberi perhatian yang besar pada persediaan karena tanpa persediaan, para pengusaha akan menghadapi resiko perusahaannya pada suatu waktu tidak lagi dapat memenuhi permintaan pelanggan (Nurlaila, 2017). Sehingga persediaan memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan usaha sebuah perusahaan baik usaha skala besar, menengah atau bahkan usaha kecil.

Mangopa et al., (2020) menemukan bahwa pengelolaan persediaan menurut standar yang berlaku yaitu SAK EMKM belum sepenuhnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Masih terdapat beberapa poin yang tidak diterapkan. Adapun perbandingan penerapan SAK EMKM pada usaha mikro & kecil menunjukkan hasil bahwa usaha kecil lebih unggul jika dibandingkan dengan usaha mikro dengan persentase penerapan sebesar 60,67% atau berada pada rentang kategori Cukup Menerapkan sementara untuk usaha mikro hanya sebesar 40,76% atau Sebagian Kecil Menerapkan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan para pelaku usaha mikro dalam mengelola persediaannya perlu dilakukan.

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang memegang peranan penting dalam jalannya sebuah usaha. Persediaan menjadi fokus utama dalam sebuah transaksi perdagangan. Tanpa persediaan maka transaksi perdagangan tidak akan pernah terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Barchelino (2016) yang mengatakan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan memprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan menjadi kas. Persediaan merupakan bagian dari aktiva lancar yang paling besar kontribusinya terhadap kelangsungan usaha sebuah perusahaan baik usaha yang memiliki skala besar, menengah atau bahkan perusahaan kecil.

Gambar 1.1

**Grafik Jumlah Pelaku UMKM Yang Menerapkan Pengelolaan Persediaan
Berdasarkan SAK EMKM tahun 2018-2020**



Sumber data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo

Grafik di atas menunjukkan bahwa di Kota Gorontalo dari tahun 2018-2020 jumlah pelaku Usaha Mikro yang menerapkan pengelolaan persediaan sesuai dengan SAK EMKM masih sangat kurang bahkan grafiknya cenderung berfluktuasi.

Berdasarkan data pelaku UMKM dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo jumlah pelaku usaha Mikro lebih banyak dari usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan peningkatan per tahunnya. Tahun 2020 pelaku usaha mikro sebanyak 8.030 dari 11.460 UMKM di Kota Gorontalo (Pratama Musue, 2021). Ini menjadi salah satu alasan penelitian ini berfokus pada usaha mikro.

Beberapa jenis UMKM sangat bergantung pada pengelolaan persediaan yang baik. Pelaku usaha dagang yang menyediakan barang kebutuhan dapat menjaga agar persediaan tetap variatif (banyak pilihan), tidak ada kerusakan, dan tidak kadaluarsa yang dapat merugikan konsumen. Atau usaha jasa yang dapat selalu yakin bahwa persediaan di tempat penyimpanan (gudang) masih menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada klien. Intinya, memiliki pengelolaan persediaan yang baik sangat diperlukan agar aktivitas bisnis tidak terganggu dan agar konsumen dapat terlayani dengan baik.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Tuli (2019) yang menjelaskan bahwa para pelaku usaha khususnya usaha mikro belum mengenal dan mengetahui adanya standar yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya yaitu SAK

EMKM. Para pelaku usaha mikro cenderung masih banyak yang belum menambahkan berbagai komponen biaya yang timbul pada saat terjadi transaksi pembelian persediaan pada harga pokok produk yang mereka jual, sehingga menyebabkan perolehan pendapatan yang sedikit bahkan cenderung mengalami kerugian.

Berkaitan dengan fenomena di atas maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Salah satu faktor dalam penerapan standar tersebut yaitu pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM, karena saat penulis melakukan observasi awal penelitian masih banyak para pelaku Usaha Mikro yang belum menerapkan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM yang baik.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah, banyak pelaku usaha yang masih salah dalam mengelola dan menentukan metode pencatatan serta pengakuan persediaan utamanya adalah para pelaku usaha mikro yang memang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi persediaan yang diatur dalam SAK EMKM.

Dalam SAK EMKM Bab 9 diatur dan dijelaskan mengenai berbagai hal tentang persediaan, diantaranya adalah pengakuan dan pengukuran biaya persediaan yang menjadi dasar penentuan harga pokok. Akan tetapi banyak yang belum tahu dan belum menerapkan SAK EMKM tersebut dalam usahanya dikarenakan ketidaktahuan dan kurangnya informasi. Banyak pelaku usaha mikro yang peneliti temui belum memahami pengelolaan persediaan yang baik, sehingga

banyak pelaku usaha tersebut yang harus menderita kerugian akibat timbulnya biaya persediaan yang tidak terjual karena habis masa layak pakainya.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif dan lanjutan penelitian sebelumnya oleh Mangopa : 2020, maka yang membedakan penelitian ini adalah mencakup secara keseluruhan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan yang masing-masing terdapat sampel sebagai sasaran dalam penelitian ini yang berasal dari semua bidang baik bidang kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agrobisnis dan teknologi internet.

Oleh karena itu, penelitian penerapan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM bagi kelangsungan usaha mikro di Kota Gorontalo ini sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya strategi pemberdayaan masyarakat khususnya para pelaku ekonomi mikro demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Edukasi mengenai pengelolaan persediaan ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip '*going concern*' pada usahanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan menurut standar yang berlaku yaitu SAK EMKM belum sepenuhnya dilakukan oleh UMKM khususnya Usaha Mikro.
2. Para pelaku usaha khususnya usaha mikro belum mengenal dan mengetahui adanya standar yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya yaitu SAK EMKM.

3. Adanya wabah covid-19 menyebabkan berbagai sektor UMKM mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya pembeli.
4. Di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terjun bebas yaitu berkontraksi -0,02 %, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kondisi ini terburuk dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM bagi kelangsungan usaha mikro di Kota Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan pengelolaan persediaan berdasarkan SAK EMKM bagi kelangsungan usaha mikro di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya Akuntansi Keuangan mengenai SAK EMKM terkait pengelolaan persediaan. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pelaku Usaha Mikro di Kota Gorontalo agar menggunakan SAK EMKM dalam pengelolaan persediaannya. Di samping itu juga bagi Dinas Koperasi dan UKM dapat lebih giat melakukan sosialisasi agar para pelaku UMKM dapat memahami tentang SAK EMKM.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para pelaku usaha maupun peneliti selanjutnya, diantaranya:

1. Mengetahui Penerapan Pengelolaan Persediaan berdasarkan SAK EMKM Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro di Kota Gorontalo merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pelaku usaha tentang pengelolaan persediaan pada usaha yang mereka jalankan dan juga sekaligus sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian pelaku usaha mikro di daerah Kota Gorontalo.
2. Penelitian ini dapat memberikan peluang bagi penelitian sejenis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan persediaan berdasarkan standar yang telah ditentukan demi terwujudnya kondisi ekonomi yang baik sehingga dapat berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah hingga pusat.

